

SALINAN

KEPUNJAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0216/O/1992
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian untuk tahun pelajaran 1991/1992.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 226/M Tahun 1986;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;
d. Nomor 64/M Tahun 1988.
e. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.



5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - b. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - d. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
 - e. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - f. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - g. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987.

- Memperhatikan: 1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-450/1/1992 tanggal 5 Mei 1992;
2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/A5.1/E/1992 tanggal 5 Mei 1992.

M E M U T U S A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lajutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor. 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; dan Nomor. 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan kejuruan sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, III Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

- kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah sekolah :
- | | |
|-------------------------|-------------|
| a. SMP Negeri | 7.830 buah; |
| b. SMA Negeri | 2.141 buah; |
| c. SMIP Negeri | 1 buah; |
| d. SMIK Negeri | 13 buah; |
| e. SMPS Negeri | 14 buah; |
| f. SMEA Negeri | 336 buah; |
| g. SMT Pertanian Negeri | 31 buah. |
- terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Mei 1992
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttt

Fuad Hassan

SALINAN Keputusan disampaikan

JALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan



REKAPITULASI PEMBUKAAN DAN PENERANGAN
SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1991/1992

NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN							JMLH	PENERANGAN							JMLH	JUMLAH SELURUHN.
		SMP	SMA	SMIP	SMT.P	SMIK	SMPS	SMEA		SMP	SMA	SMIP	SMT.P	SMIK	SMPS	SMEA		
1.	DKI Jakarta	3	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
2.	Jawa Barat	75	26	-	-	-	-	-	101	1	-	-	-	-	-	-	1	102
3.	Jawa Tengah	120	30	-	-	-	-	-	150	1	-	-	-	-	-	-	1	151
4.	DI. Yogyakarta	7	6	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	13
5.	Jawa Timur	97	38	-	-	-	-	-	135	-	-	-	-	-	-	-	-	135
6.	DI. Aceh	18	8	-	-	1	-	-	27	-	3	-	-	-	-	-	3	30
7.	Sumatera Utara	48	9	-	-	1	-	1	59	-	-	-	-	-	-	-	-	59
8.	Sumatera Barat	7	4	-	-	-	-	-	11	1	-	-	-	-	-	-	1	12
9.	R i a u	19	4	-	-	-	-	-	23	1	-	-	-	-	-	-	1	24
10.	J a m b i	6	2	-	-	1	-	-	9	2	-	-	-	-	-	1	3	12
11.	Sumatera Selatan	8	3	-	-	-	-	-	11	7	-	-	-	-	-	-	7	18
12.	Lampung	8	4	-	-	-	-	-	12	1	1	-	-	-	-	-	2	14
13.	Kalimantan Barat	12	5	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	17
14.	Kalimantan Tengah	6	1	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7
15.	Kalimantan Selatan	8	2	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10
16.	Kalimantan Timur	7	6	-	-	-	1	1	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15
17.	Sulawesi Utara	5	1	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7
18.	Sulawesi Tengah	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
19.	Sulawesi Selatan	26	7	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	1	-	34
20.	Sulawesi Tenggara	10	4	-	-	-	-	1	15	2	-	-	-	-	-	-	2	17
21.	Maluku	4	1	-	-	-	-	-	5	1	2	-	-	-	-	-	3	8
22.	Bali	6	2	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8
23.	Nusa Tenggara Barat	19	5	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	24
24.	Nusa Tenggara Timur	11	4	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15
25.	Irian Jaya	8	4	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	12
26.	Bengkulu	9	3	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	12
27.	Timor Timur	5	2	-	-	1	-	-	8	-	-	-	-	-	-	2	2	10
J u m l a h		552	181	1	1	4	1	4	744	17	6	-	-	-	-	4	27	771

1	2	3	4	5	6	7
2.	JAWA BARAT					
A.	PEMBUKAAN	1. SMP Negeri 2 Soreang	-	Soreang	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.5110 09.1.2.1038.23.01.02.5120 09.1.2.1038.23.01.02.5150
		2. SMP Negeri 2 Pacet	-	Pacet	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.5210 09.1.2.1038.23.01.02.5220 09.1.2.1038.23.01.02.5230
		3. SMP Negeri 4 Ciparay	-	Ciparay	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.5250 09.1.2.1038.23.01.02.5350
		4. SMP Negeri 3 Ciwidey	-	Ciwidey	Kabupaten Bandung	
		5. SMP Negeri 1 Cimenyan	-	Cimenyan	Kabupaten Bandung	
		6. SMP Negeri 3 Kedunghalang	-	Kedunghalang	Kabupaten Bogor	
		7. SMP Negeri 2 Parung	-	Parung	Kabupaten Bogor	
		8. SMP Negeri 3 Ciomas	-	Ciomas	Kabupaten Bogor	
		9. SMP Negeri 1 Jatisampurna	-	Jatisampurna	Kabupaten Bekasi	
		10. SMP Negeri 9 Bekasi	-	Bekasi Barat	Kabupaten Bekasi	
		11. SMP Negeri 10 Bekasi	-	Bekasi Selatan	Kabupaten Bekasi	
		12. SMP Negeri 2 Lemahabang	-	Lemahabang	Kabupaten Bekasi	



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
KANTOR KABUPATEN BEKASI

Jalan Jenderal Achmed Yani Nomor 3 Telepon. 021 41957 - 8841960 Bekasi

Nomor : 2670/02.24/PR/1997
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Perubahan Nomenklatur SMP, SMA dan SMKTA
menjadi SLTP, SMU dan SMK

4 Juli 1997

Yth. Kepala KPNK Karawang
di Karawang.

Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal Depdikbud no: 410007/A/1997 tanggal 3 April 1997 perihal selogunannya pokok surat di atas dengan ini beritukukan bahwa:

1. Perubahan Nomenklatur :

- a. Nomor 034/0/1997 tentang perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta organisasi Tata Kerja SLTP.
- b. Nomor 035/0/1997 tentang perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta organisasi dan Tata Kerja SMU
- c. Nomor 036/0/1997 tentang perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta organisasi dan Tata Kerja SMK

2. Perubahan Nomenklatur selogunannya nomor 1 di atas, mengubah pola penulisan Kepala Surat Dinas, Kode Surat Dinas, Cap Dinas/ Stempel dan Pupuk Nama Sekolah

3. Selubungannya dengan perubahan Kota Administratif (Kolip) Bekasi Kota Madya (Kadyna) Bekasi, maka terdapat beberapa sekolah berubah nama (perubahan terlampir)

Selanjutnya mengenai penggunaan stempel/cap, surat menyurat yang berkaitan dengan STTB kami mulai sejak tanggal 1 Juni 1997; sedangkan untuk kepentingan administrasi lainnya kami tetapkan secara bertahap.

Demikian surat menjadi maklum



Tisna Lyndiana
Tisna Lyndiana
30320689

- Tembusan Yth.
- 1. Kepala Kanwil Depdikbud
Propinsi Jawa Barat di Bandung
 - 2. Kepala SLTP/SMU/SMK
di Kabupaten Bekasi

Daftar Nama Sekolah
Kotamadya Bekasi

No	Nama Sekolah	Sekolah Asli					Nama Sekolah	Hasil Perubahan		
		Lokasi Sekolah		Keputusan Pelaksanaan Sekolah				Lokasi Sekolah		
		Alamat Sekolah	Kecamatan	Kode	Nomor dan Tanggal	Tetap		Alamat Sekolah	Kecamatan	Kode
1	SMON Bantarabeg	J. Raya Pedurungan	Bantarabeg	Bekasi	01570/94 20-11-84	Pembaharuan	SLTPN 10 Bekasi	J. Raya Pedurungan	Bantarabeg	Bekasi
2	SMON 6 Bekasi	J. Utama Harapan Baru	Bekasi Baru I	Bekasi	01160/92 05-05-92	Pembaharuan	SLTPN 13 Bekasi	J. Utama Harapan Baru	Bekasi Baru I	Bekasi
3	SMON 11 Bekasi	J. Siman No. 1	Bekasi Baru I	Bekasi	01150/92 12-05-92	Pembaharuan	SLTPN 14 Bekasi	J. Siman No. 1	Bekasi Baru I	Bekasi
4	SMON 14 Bekasi	J. Pahlawan Harapan Indah	Bekasi Baru I	Bekasi	01500/94 05-10-94	Pembaharuan	SLTPN 19 Bekasi	J. Pahlawan Harapan Indah	Bekasi Baru I	Bekasi
5	SMON 4 Bekasi	J. Terang Raya Permai I	Bekasi Selatan	Bekasi	01000/80 30-07-80	Pembaharuan	SLTPN 4 Bekasi	J. Terang Raya Permai I	Bekasi Selatan	Bekasi
6	SMON 5 Bekasi	J. Selamat Permai II	Bekasi Selatan	Bekasi	01000/80 09-10-80	Pembaharuan	SLTPN 7 Bekasi	J. Selamat Permai II	Bekasi Selatan	Bekasi
7	SMON 10 Bekasi	J. Pahlawan Pahlawan Jaya	Bekasi Selatan	Bekasi	01160/92 05-05-92	Pembaharuan	SLTPN 12 Bekasi	J. Pahlawan Pahlawan Jaya	Bekasi Selatan	Bekasi
8	SMON 1 Bekasi	J. KH Agus Salim No. 135	Bekasi Timur	Bekasi	01660/81 14-08-81	Pembaharuan	SLTPN 1 Bekasi	J. KH Agus Salim No. 135	Bekasi Timur	Bekasi
9	SMON 2 Bekasi	J. Chaid Anwar No. 57	Bekasi Timur	Bekasi	01000/77 24-10-77	Pembaharuan	SLTPN 2 Bekasi	J. Chaid Anwar No. 57	Bekasi Timur	Bekasi
10	SMON 3 Bekasi	J. KH Agus Salim No. 75	Bekasi Timur	Bekasi	01000/79 17-01-79	Inggris	SLTPN 3 Bekasi	J. KH Agus Salim No. 75	Bekasi Timur	Bekasi
11	SMON 7 Bekasi	J. Cendekia B. Minatung	Bekasi Timur	Bekasi	01570/84 20-11-84	Pembaharuan	SLTPN 8 Bekasi	J. Cendekia B. Minatung	Bekasi Timur	Bekasi
12	SMON 8 Bekasi	J. P. Semesta No. 25 Permai 1	Bekasi Timur	Bekasi	01150/89 14-03-89	Pembaharuan	SLTPN 11 Bekasi	J. P. Semesta No. 25 Permai 1	Bekasi Timur	Bekasi
13	SMON 15 Bekasi	J. Nanggang Raya	Bekasi Timur	Bekasi	01000/95 12-05-95	Pembaharuan	SLTPN 16 Bekasi	J. Nanggang Raya	Bekasi Timur	Bekasi
14	SMON 11 Bekasi	J. KH Agus Salim No. 15	Bekasi Timur	Bekasi	01390/94 05-10-94	Alh. Hidayat	SLTPN 18 Bekasi	J. KH Agus Salim No. 15	Bekasi Timur	Bekasi
15	SMON 4 Bekasi	J. Raya Sejahtera	Bekasi Utara	Bekasi	0470/83 07-11-83	Pembaharuan	SLTPN 5 Bekasi	J. Raya Sejahtera	Bekasi Utara	Bekasi
16	SMON 1 Bekasi	J. Permai IV	Jatibek	Bekasi	01770/84 20-11-84	Pembaharuan	SLTPN 9 Bekasi	J. Permai IV	Jatibek	Bekasi
17	SMON 10 Bekasi	J. Cendekia B. Permai	Jatibek	Bekasi	01160/92 05-05-92	Pembaharuan	SLTPN 15 Bekasi	J. Cendekia B. Permai	Jatibek	Bekasi
18	SMON 1 Pondokgadis	J. Masjid Nuri Damar	Pondokgadis	Bekasi	01000/81 14-07-81	Pembaharuan	SLTPN 6 Bekasi	J. Masjid Nuri Damar	Pondokgadis	Bekasi
19	SMON 2 Pondokgadis	J. Masjid Kemang	Pondokgadis	Bekasi	01000/95 25-08-95	Pembaharuan	SLTPN 17 Bekasi	J. Masjid Kemang	Pondokgadis	Bekasi
20	SMON 3 Pondokgadis	J. Pondok Kemang No. 11	Pondokgadis	Bekasi	01000/94 05-10-94	Pembaharuan	SLTPN 20 Bekasi	J. Pondok Kemang No. 11	Pondokgadis	Bekasi
21	SMAN 1 Bekasi	J. KH Agus Salim No. 101	Bekasi Timur	Bekasi	79SKAB/III 30-07-84	Pembaharuan	SMUN 1 Bekasi	J. KH Agus Salim No. 101	Bekasi Timur	Bekasi
22	SMAN 2 Bekasi	J. Tangkuban Perahu	Bekasi Selatan	Bekasi	04750/83 09-11-83	Pembaharuan	SMUN 2 Bekasi	J. Tangkuban Perahu	Bekasi Selatan	Bekasi
23	SMAN 3 Bekasi	J. P. Sidi No. 1 Panyas	Bekasi Selatan	Bekasi	01070/80 22-12-80	Pembaharuan	SMUN 3 Bekasi	J. P. Sidi No. 1 Panyas	Bekasi Selatan	Bekasi
24	SMAN 4 Bekasi	J. Cendekia Permai Hrp. Jaya	Bekasi Utara	Bekasi	01500/94 05-10-94	Pembaharuan	SMUN 4 Bekasi	J. Cendekia Permai Hrp. Jaya	Bekasi Utara	Bekasi
25	SMAN 1 Jabab	J. Pr. Pd. Mitra Lestari	Jatibek	Bekasi	01000/94 05-10-94	Pembaharuan	SMUN 5 Bekasi	J. Pr. Pd. Mitra Lestari	Jatibek	Bekasi
26	SMAN 1 Pondokgadis	J. Gempil	Pondokgadis	Bekasi	01000/90 11-04-90	Pembaharuan	SMUN 5 Bekasi	J. Gempil	Pondokgadis	Bekasi